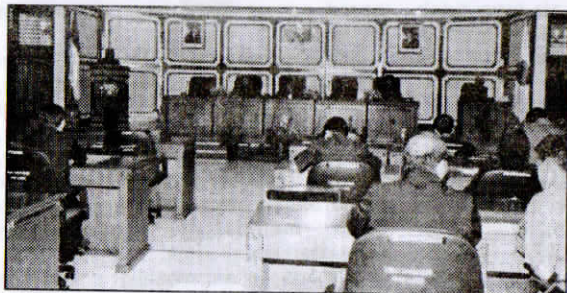


Kamis, 21 Juli 2011

Pandangan Umum Pelaksanaan APBD 2010



ACARA PU FRAKSI TERHADAP NOTA PENGANTAR WALIKOTA

Singkawang, BERKAT.

Bertempat di ruang utama DPRD Kota Singkawang, Rabu (20/7), dilaksanakan Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Walikota Singkawang, tentang pelaksanaan APBD Tahun 2010.

Acara yang dihadiri oleh Wakil Walikota Singkawang, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Plt. Sekda, unsur-unsur pimpinan dan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Unsur Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Singkawang dan undangan lainnya.

Fraksi PDI-P melalui juru bicaranya, Viktorianus, menilai bahwa yang menjadi titik lemah masalah asset dan itu terjadi sejak Tahun 2002 sampai dengan 2010.

Selain itu Walikota harus selalu memperhatikan kepala SKPD di dalam pengawasan internnya, dan menin-

daklanjuti rekomendasi BPK RI Perwakilan.

Selanjutnya Fraksi Aseda melalui Paryanto, mengatakan Pemkot masih lemah dan tidak peduli tentang asset, khususnya tanah, yang sebagian belum dilakukan pensertifikasi.

Dan yang tak kalah pentingnya, lanjut Paryanto, ada SKPD yang serah terima pekerjaan yang belum selesai seperti terjadi pada kolam labuh dan Terminal.

Selain itu fraksi Akseda masih mempertanyakan retribusi walet yang

masih nihil jika dibandingkan dengan retribusi kesehatan. "Di Rumah Sakit saja kok dapat, kok malah walet yang tidak ada sama sekali," sindir Paryanto.

Dan terakhir fraksi Akseda menyorot masih rendahnya kesadaran wajib pajak yang menyebabkan pendapatan daerah tidak sesuai dengan target. "Kami menyampaikan kepada Walikota untuk melakukan kontrak kerja ke Kepala SKPD," katanya lagi.

Fraksi Demokrat dengan juru bicaranya Aloysius Kilim menjelaskan pertanggungjawaban bukan secara tertulis di secarik kertas saja akan tetapi pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Aloysius mengungkapkan masih rendahnya kualitas pelayanan masyarakat dan banyak pembangunan yang belum dinikmati.

Selanjutnya PAD masih belum memberikan kontribusi yang memuaskan yang pada akhirnya Aloysius mempertanyakan apakah ratio objek pajak dengan tenaga penagih dilapangan sudah sebanding, dan selanjutnya Fraksi partai yang sedang berkuasa tersebut menyorot retribusi walet.

Fraksi PIB lewat Sumian, sebagai juru bicaranya mengatakan masih kurang optimalnya pajak yang di peroleh dari objek pajak dan mempertanyakan kinerja instansi terkait. "Pemkot masih kurang melakukan pengamanan terhadap asset-

asetnya, untuk itu perlu dilakukan pensertifikasi tanah," kata Sumian.

Dan yang perlu diperhatikan juga oleh instansi terkait tentang pembangunan jalan agar terencana lebih baik lagi. Sedangkan Fraksi Golkar pada saat gilirannya untuk memberikan pandangannya tanpa alasan yang jelas tidak bersedia.

Terahir Fraksi Perjuangan kedaulatan Rakyat melalui Sumberanto Tjitra, menilai pengawasan kinerja terhadap setiap SKPD harus rutin dilakukan, dan pelayanan prima terhadap publik harus ditingkatkan. "Pelayanan PDAM harus segera diperbaiki, masa tergantung dengan curah hujan," katanya.

Selanjutnya optimalisasi terhadap pajak dan masih banyak bangunan yang belum memiliki PBB serta penjelasan nyata untuk target-target PAD. Kemudian lanjut Sumberanto, kinerja PNS untuk dapat ditingkatkan lagi dan terakhir masalah perencanaan yang tidak sesuai dengan bestek sehingga perlu pengawasan dari SKPD. (rud)